

## Dapat Opini WDP, Cornelis Kesal

**PONTIANAK**—Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Gubernur Kalbar, Cornelis mengaku kesal atas opini tersebut karena sebenarnya bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, jika tidak terganjal persoalan aset.

"Karena kesalahannya tidak terlalu prinsip, hanya mencatat dan membukukan harta kekayaan tidak dilakukan, saya sebenarnya kesal. Habis ini

langsung saya arahkan lagi dan dikumpulkan (kepala satuan kerja perangkat daerah) ke Pendopo," ujar Cornelis, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar Penyampaian Laporan BPK RI Perwakilan Kalbar tentang Laporan Keuangan Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2011, Kamis (5/7) di DPRD Kalbar.

Cornelis menyatakan akan segera menindaklanjuti temuan BPK yang menjadi penghalang pemprov

◆ Ke Halaman 7 Kolom 5



Cornelis

## Dapat Opini WDP, Cornelis Kesal

Sambungan dari halaman 1

mendapatkan opini WTP, yakni persoalan aset. Ia juga akan melihat kerja SKPD dalam menyelesaikan persoalan tersebut. "Sedikit lagi (mendapatkan WTP). Apa yang diperintahkan BPK tadi sudah jelas. Dikerjakan dulu sejauh mana. Kalau tidak selesai, mau tidak mau (evaluasi SKPD)," katanya.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI DR H Rizal Djalil mengatakan sebenarnya Provinsi Kalimantan Barat bisa mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangannya tahun anggaran 2011, jika persoalan aset dapat diselesaikan. "Opini yang diberikan BPK adalah wajar dengan pengecualian. Saya berjanji jika persoalan aset selesai, tidak ada persoalan yang signifikan, kedepannya bisa WTP," kata Rizal, kemarin.

Rizal menjelaskan secara global dari hasil pemeriksaan BPK RI, Kalbar banyak mencapai kemajuan. Banyak terdapat peningkatan. Misalnya jika menggunakan indikator utama realisasi anggaran, terjadi peningkatan surplus menjadi Rp206,9 miliar pada 2011 dari Rp78,7 miliar pada tahun sebelumnya. Pada 2011 juga terjadi penurunan pem-

biayaan netto menjadi Rp135 miliar dari Rp153 miliar pada 2010. Kondisi ini berdampak pada peningkatan silva sebesar Rp111 miliar, yakni menjadi Rp342 miliar pada 2011 dari Rp231 miliar pada tahun sebelumnya. Begitu pula tingkat investasi pemprov, mengalami kenaikan signifikan dari Rp0,43 triliun menjadi Rp2,9 triliun pada saat ini.

"Jika melihat indikator-indikator tersebut, terjadi perubahan signifikan. Tetapi di sisi lain masih ada hal-hal yang menjadi masalah, yang sebenarnya sudah disampaikan yakni tentang aset," ungkap Rizal.

Rizal menuturkan persoalan aset yang paling menonjol adalah aset tetap berupa jalan dan irigasi dengan nilai Rp380 miliar. Pada provinsi lain, jalan dan irigasinya tidak ada alias fiktif. Di Kalbar, jalan dan irigasi dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ada. Hanya saja aset tersebut belum ditatakelolakan dalam pembukuan yang benar. "Jadi hanya perlu dikelola dengan standar akuntansi yang ada," kata Rizal.

Persoalan lainnya adalah aset tanah senilai Rp92,2 miliar dan peralatan mesin senilai Rp2,8 miliar yang belum tuntas penatalaksanaannya. Selain itu, lanjut Rizal, ada tanah milik pemprov

yang belum bersertifikat senilai Rp53 miliar.

Ia meminta Sekretaris Daerah Kalbar dan semua jajaran SKPD terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan lainnya segera membuat rencana aksi untuk menyelesaikan persoalan aset.

"Segera buat rencana aksi untuk memperbaiki, menata-laksanakan, membukukan, dan menilai sehingga persoalan aset bisa selesai. Persoalan teknis ini bukan tugas Gubernur, melainkan SKPD," katanya.

Temuan BPK lainnya adalah kesalahan dalam penanggangan. Rizal meminta Sekda Kalbar mendorong SKPD untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kalau kemarin selesai, paling tidak 85 persen, sudah bisa WTP," ujarnya.

Ia menilai SKPD tidak serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. "Bisa dibentuk tim khusus untuk menyelesaikannya. Misalnya sertifikat, apa susahnya membuat sertifikat. Ini tergantung dari niatnya," kata Rizal.

Rizal meminta Gubernur Kalbar lebih tegas kepada SKPD. "Jika SKPD tidak berprestasi, bisa dilakukan penyegaran," timpalnya. (uni)